

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR FEBRUARI 2012

Kegiatan DPR-RI awal bulan Februari 2012 ini diawali dengan pertemuan Pimpinan Lembaga Negara pada hari Senin, 20 Februari 2012. Kegiatan DPR-RI minggu ini tetap diwarnai oleh berbagai kegiatan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sementara itu, Sidang *the 3rd G20 Speakers Consultation* di Riyadh, Arab Saudi, juga mewarnai kegiatan DPR di bidang diplomasi parlemen. Berikut ringkasan beberapa kegiatan DPR-RI akhir Februari 2012.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara, Senin (20/03), di ruang delegasi Nusantara IV Gedung MPR/DPR/DPD mengambil tema: “Membangun Demokrasi Yang Baik menuju Pemilu 2014”. Tuan rumah pertemuan adalah Ketua DPR-RI. Hadir dalam pertemuan ini adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, Ketua MPR-RI, Ketua dan Wakil Ketua DPR-RI, Ketua DPD-RI, Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK, Ketua KY, 3 Menko Kabinet Indonesia Bersatu II, Mensesneg, dan beberapa pejabat penting lainnya.

Jalannya pertemuan diawali dengan kata pengantar oleh Ketua MPR-RI dilanjutkan penjelasan seputar kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Ketua DPR menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam kerangka membangun demokrasi yang baik menuju Pemilu 2014, sekaligus penjelasan mengenai kegiatan DPR dalam pembahasan RUU Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Ketua-Ketua lembaga lainnya, dan terakhir Presiden RI, memberikan penjelasan tentang pokok-pokok pikiran masing-masing lembaga mengenai hal-hal yang sudah dan harus dilakukan, serta langkah bersama yang perlu dirumuskan terkait dengan tema tersebut yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga. Akhir pertemuan, Ketua DPR membacakan *Joint Press Statement* yang intinya sebagai berikut: [1] pimpinan lembaga negara melihat bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa dalam kehidupan



berdemokrasi, namun demikian, perlu membangun demokrasi yang lebih sehat dengan perlunya etika dan *rule of law*; [2] nilai demokrasi yang bersifat universal, yang dijadikan dasar dalam bernegara, antara lain: kesetaraan, penghargaan terhadap HAM, terpenuhinya hak-hak berserikat dan berkumpul, dan lain-lain. Sistem demokrasi dipilih sesuai dengan amanat bapak bangsa pendiri Republik Indonesia dengan landasan empat pilar dalam membangun demokrasi konstitusional. [3] pengalaman bangsa menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai paradoks demokrasi. Masih ada kelemahan dalam berdemokrasi, yakni adanya praktek kekerasan di masyarakat, dan pragmatisme-transaksional yang berpotensi munculnya *political distrust*. Untuk itu, pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut bersikap tegas menegakkan hukum dan tidak membuka ruang bagi kekerasan atau anarkhisme atas nama kebebasan dan demokrasi. [4] memperbaiki UU Pemilu melalui perubahan atas UU No. 10 tahun 2008, yang masih menyisakan 4 masalah krusial. UU ini selambat-lambatnya selesai akhir Maret 2012 agar cukup waktu untuk sosialisasi. [5] kesiapan Pemilu 2014 diharapkan dapat menutup celah-celah kekurangan praktek Pemilu 2009. [6] praktek Pemilu diharapkan menjamin kualitas kompetisi Pemilu, diberi kesempatan Parpol untuk mengajukan calon berkualitas, tata cara pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara yang lebih pasti. [7] ini yang harus dibenahi yaitu: regulasi, aktor, dan kelembagaan partai. [8] hasil

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM**: Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**: Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH**: Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA**: Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI**: Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI**: Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI**: Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnu Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO**: Rizka Arinindya **SIRKULASI**: Supriyanto **Diterbitkan Oleh**: Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Pemilu dengan sistem dan aturan yang lebih baik, diharapkan menghasilkan wakil rakyat yang responsif, menciptakan pemerintahan yang legal dan *legitimate*.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Komisi-Komisi DPR, Pansus, dan Baleg, melanjutkan pembahasan RUU Prioritas, baik pada Masa Sidang III maupun IV. Untuk Masa Sidang III, diprediksi akan dapat diselesaikan 12 RUU, baik RUU Prioritas maupun RUU Kumulatif Terbuka. RUU-RUU tersebut adalah: untuk Komisi I, 3 RUU Kumulatif Terbuka, yang masih akan diagendakan pembahasannya yaitu: [1] RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism*), [2] RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan kerjasama di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities In The Field Of Defence*), dan [3] RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between the Departement of Defence and Security of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Italian Republic Concerning Cooperation in The Field of Defence Equipment, Logistics And Industry*).

Untuk Komisi II: 2 RUU, yaitu [1] RUU tentang Aparatur Sipil Negara yang semua judulnya adalah RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, [2] RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Ditingkat Panja RUU ini masih akan menyelesaikan pokok-pokok substansi berdasarkan sistem clusster yaitu: [1] mekanisme pengisian Kepala Daerah, [2] Pertanahan dan Tata Ruang, dan [3] Penamaan.

Komisi III: 2 RUU, yaitu: [1] RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah mengalami perpanjangan, dan [2] RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Komisi IV: satu RUU, yaitu RUU tentang Pangan. Komisi X: 2 RUU, yaitu: [1] RUU tentang Pendidikan Tinggi, dan [2] RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Sementara, 2 RUU lain yang ditangani Pansus, yaitu [1] RUU tentang Perubahan Atas UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan [2] RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penyelesaian Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, diharapkan selesai akhir Maret 2012. Target ini diharapkan dapat ditepati agar memberikan waktu per-

siapan kepada Lembaga Penyelenggara pemilu dan Partai Politik, sekaligus sosialisasi pada masyarakat pemilih. Materi yang sudah disepakati/selesai dibahas adalah berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Intinya ialah, bahwa sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara, tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai. Terhadap pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, selama 5 bulan (Agustus-Desember 2012); proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar Desember 2012); Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data pemilih selama 2 bulan; penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah kepada KPU dilakukan sekurang-kurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan.

Empat materi krusial, sampai sekarang masih belum dilakukan pembahasan, yaitu: [1] sistem Pemilu dan penetapan calon terpilih, [2] daerah pemilihan dan alokasi kursi, [3] parliamentary treshold, dan [4] penghitungan perolehan kursi (konversi suara). Materi yang pending adalah masalah Pemilu serentak dan keterwakilan perempuan.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Komisi IX telah melakukan RDP, 13 Februari 2012, dengan Kepala BKKBN dengan agenda: [1] evaluasi dan capaian program KB dan kependudukan tahun 2011; [2] *roadmap* dan strategi/kebijakan BKKBN untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015, termasuk *roadmap* pelaksanaan program dan pembelian dan pemberian alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur; dan [3] temuan BPK terhadap laporan keuangan BKKBN 2011. Kesimpulannya antara lain Komisi IX mendorong: [1] untuk mengkaji lebih dalam *roadmap* dan strategi BKKBN tahun 2012 serta senantiasa



meningkatkan kapabilitas sumberdaya dan kerjasama lintas sektoral, sehingga dapat mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015; [2] menjamin pelaksanaan penyimpanan alat kontrasepsi di daerah dan pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasangan usia subur, serta ketersediaan dan aksesibilitas alat kontrasepsi; [3] meningkatkan upaya pengembangan program KB di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dengan optimalisasi akses informasi pemerataan distribusi tenaga KIE-KB dan sarana prasarana pelayanan KB.

RDP Komisi IX dengan kepala BNP2TKI pada 30 Januari, menyimpulkan: [1] Komisi IX mendukung pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan moratorium sampai ditandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia dan juga negara penempatan lain; [2] Komisi IX meminta BNP2TKI untuk memberikan masukan yang sistematis kepada Kemenakertrans mengenai perbaikan mekanisme pelaksanaan asuransi perlindungan TKI-LN; [3] Komisi IX meminta BNP2TKI bersama Kemenakertrans untuk menyelesaikan persoalan kewenangan dalam hal penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP); [4] BNP2TKI harus meningkatkan koordinasi dengan pemda terkait pengawasan pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan BLK; [5] dalam menyelesaikan kasus-kasus TKI-LN, Komisi IX mendesak agar BNP2TKI meningkatkan perannya dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kemenlu dan Perwakilan RI di negara penempatan.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan rapat-rapat kerja DPR dengan pasangan kerjanya dalam bentuk pembahasan tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN tahun 2011, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2011, dan Rencana Pelaksanaan APBN 2012. Komisi VIII telah melakukan Raker dengan Menteri Sosial RI. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Raker tersebut antara lain: [1] terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan APBN 2011 hendaknya menjadi dasar perbaikan dan meningkatkan penyerapan anggaran 2012, diantaranya kegiatan tugas perbantuan provinsi agar anggaran dapat diserap 100%; [2] mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK 2011, menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan melaksanakan program dan kegiatan penguatan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2012; [3] Komisi VIII mengharapkan Menteri Sosial RI dalam melaksanakan APBN 2012 memperhatikan saran Komisi VIII, antara lain tentang penanganan fakir miskin sebagai tindak lanjut UU No. 13 tahun 2011. Penanganan ini harus terkoordinasi dan terintegrasi berdasar data yang akurat dan hasil kajian yang komprehensif; [4] dioptimalkan alokasi APBN 2012, meskipun masih terbatas, tetap kepada sasaran untuk mengatasi masalah sosial melalui program unggulan di setiap satuan kerja dalam melakukan program perlindungan

dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Komisi VIII dan Menteri Sosial sepakat untuk melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Menkokesra, Mendikbud, Kepala BPS, dan Ketua (TNP2K), dalam rangka menyamakan persepsi dan menyusun kebijakan anggaran dan program serta strategi bersama untuk penguatan kementerian sosial sebagai penanggungjawab utama (*leading sector*) penanggulangan kemiskinan.

KONFERENSI G20 DI ARAB SAUDI

Sidang *the 3rd G20 Speakers Consultation* di Riyadh, Arab Saudi, 25-26 Februari 2012, dihadiri oleh delegasi DPR-RI dipimpin oleh Ketua DPR-RI didampingi oleh Ketua BKSAP dan 3 anggota Dewan. Agenda sidang yaitu: [1] *global dialogue of cultures* (dialog internasional mengenai kebudayaan); [2] *energy of sustainable development* (energi untuk pembangunan yang berkesinambungan); [3] *financial crisis and its impact on global economy* (krisis keuangan dan dampaknya terhadap ekonomi dunia).

Misi delegasi DPR-RI dalam tiga agenda tersebut akan menitikberatkan pada *energy for sustainable development*, dimana ketua delegasi/Ketua DPR-RI akan memberikan statement didalam pembahasan topik ini, yang pada intinya: menekankan pada perlunya riset dan investasi dalam diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan (*new and renewable resources*). Delegasi juga akan aktif dalam sesi dengan agenda *global dialogue on culture* yang akan menekankan dialog, baik antar umat beragama maupun antar budaya, bahkan antar peradaban yang akan menghasilkan sikap toleransi dan saling memahami, dimana Indonesia dapat menjadi contoh (sebagai *rule model*). Agenda mengenai *financial crisis and its impact global economy*, delegasi DPR menekankan perlunya mencari cara/kebijakan yang jitu untuk mengakhiri krisis yang terjadi di Eropa. Karena, jika berlarut-larut akan berdampak pada perekonomian global.

Pada akhir sidang akan dihasilkan *Joint Comunique*. Delegasi DPR-RI juga akan melakukan *bilateral meeting* dengan parlemen-parlemen Eropa, Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.

PERGANTAIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU

Pada hari Rabu, 23 februari 2012, Ketua DPR-RI telah melakukan pengambilan sumpah 2 anggota DPR-RI Pengganti Antar Waktu, yaitu: KH. Ahmad Mustain Syafi'ie M.Ag mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jatim VIII menggantikan Sutjipto, SH. MKn; dan Sayed Mustafa Usab mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Nangroe Aceh Darussalam I menggantikan Ir. H. Azwar Abubakar MM. penggantian antar waktu tersebut didasarkan pada Kepres No. 18 dan 19/P tahun 2012. *

DPR Minta Pemerintah Tegas Dalam Mensikapi Penegakkan Hukum

Pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut untuk bersikap tegas bersama menegakkan hukum, bukan memberikan ruang aksi kekerasan atau anarkisme melanda masyarakat atas nama kebebasan dan demokrasi.

Hal ini diungkapkan Ketua DPR RI, Marzuki Alie dalam joint press statement pertemuan pimpinan lembaga negara, di Gedung Nusantara IV DPR, Senin (20/2).

Marzuki menilai, pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi dari nilai demokrasi konstitusional yang kita dambakan. “Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi, salah satunya yakni masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme-transaksional terutama pada pelaksanaan pemilu dan pemilukada,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Marzuki, untuk memperbaiki implementasi demokrasi di Indonesia, DPR RI tengah membahas RUU tentang perubahan Atas UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana masih ada beberapa hal yang harus disepakati dalam forum Panja (Panitia Kerja). Yaitu: ketentuan tentang parliamentary threshold, ketentuan konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu yang hendak digunakan, dan terkait dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI.

Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian segenap para petinggi partai politik agar dapat mendorong tercapainya kesepakatan atas hal penting tersebut, sehingga hal-hal itu dapat segera terselesaikan selambat-lambatnya akhir Maret 2012 dan cukup waktu untuk dilakukan sosialisasi.

Marzuki berharap RUU tentang Pemilu yang sedang dibahas di DPR RI mempunyai kelebihan dibandingkan aturan main politik Pemilu 2009. Begitu juga dari segi kesiapan pelaksana pemilu diharapkan menutup celah-celah kekurangan praktik Pemilu 2009. Yakni pertama: memperbaiki sistem kependudukan dan pendaftaran pemilu (DPT), sehingga tidak ada lagi kekisru-

han yang mengurangi kualitas pelaksanaan pemilu atau menjamin hak-hak politik pemilu. Kedua: menjamin sosialisasi pemilu yang lebih baik.

Berdasarkan identifikasi umum permasalahan dalam demokrasi dan pelaksanaan pemilu tersebut, inti yang harus diperhatikan untuk dibenahi adalah regulasi, aktor, dan kelembagaan partai politik, kata Marzuki seraya menambahkan ketiganya harus menjadi landasan pemikiran dalam memperbaiki demokrasi.

Dalam kaitan ini Marzuki mengharapkan di dalam penyusunan undang-undang pemilu perlu diperhatikan tentang time line untuk menghindari dan memastikan proses penyelesaian sengketa hukum yang terjadi pasca pemilu. Begitu juga dalam membangun demokrasi yang baik, selain perangkat undang-undang yang baik juga didukung oleh etika agar menghasilkan demokrasi yang lebih bermartabat dan mengarah kepada terciptanya konsolidasi demokrasi.(iw)/foto:iw/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan sambutan pidato pada acara Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Komisi III Minta PPATK Lanjutkan Pemeriksaan 2000 Rekening Anggota Dewan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta tidak ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap rekening anggota DPR yang mencurigakan. Siapapun yang terindikasi melanggar peraturan dan perundang-undangan harus diproses secara hukum.



Jajaran PPATK saat Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR

“Kami tidak ingin memproteksi dewan tapi kalau memang itu sedang dilakukan PPATK kami sangat berharap proses analisis dilakukan tidak dalam tempo yang lama dan segera diumumkan pada publik,” kata Ketua Komisi III Benny K. Harman dalam RDP dengan PPATK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/12).

Sebelumnya anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Alhabsy, mempertanyakan bagian laporan tentang temuan 2000 rekening anggota DPR mencurigakan ditutupi dengan spidol hitam. “Halaman 21 laporan ini terbaca juga oleh saya, ternyata tentang teman-teman DPR disebutkan. Tapi kenapa bagian ini dicoret, sekarang zaman keterbukaan jadi itu hak publik,” imbuhnya.

PPATK patut menjelaskan lebih jauh 2000 rekening mencurigakan itu apak-

ah terkait anggota DPR di tingkat pusat atau di daerah. Bagi Benny K. Harman laporan yang menyebut sebagian besar transaksi dilakukan anggota Badan Anggaran itu, patut segera ditindaklanjuti karena menyangkut kepercayaan publik kepada dewan.

Menjawab hal ini Kepala PPATK M. Yusuf mengatakan proses analisis terhadap 2000 rekening mencurigakan tersebut masih berlangsung. “Kami tidak pernah berniat tidak transparan, kenapa kami coret dalam laporan karena tidak sinkron dengan pertanyaan tertulis yang diberikan. Temuan 2000 rekening anggota dewan tidak dalam kaitan menutupi tetapi masih analisis, masih dalam proses belum merupakan hasil,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil kemudian menegur Kepala PPATK agar

dalam menyiapkan laporan lebih teliti, sehingga tidak perlu lagi mencoret bagian dari penjelasan yang sudah dipersiapkan.

Analisis PPATK Diabaikan Penyidik

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding mempertanyakan langkah PPATK menindaklanjuti total 1890 hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan yang telah disampaikan kepada penyidik. “Dari analisis yang telah disampaikan kepada Polri, KPK dan penyidik lain sepertinya PPATK hanya menunggu, kenapa tidak berupaya menanyakan sejauh mana tindak lanjut penyidikan,” tegasnya.

Pada bagian lain Nasir Djamil meminta penjelasan tentang tindak lanjut hasil analisis rekening mencurigakan yang dimiliki oleh aparat militer. Baginya permasalahan belum adanya regulasi yang mengatur penyampaian analisis PPATK yang melibatkan anggota TNI patut segera dicarikan jalan keluarnya.

Ketua PPATK M. Yusuf membenarkan saat ini masih melakukan pembicaraan dengan pihak terkait untuk menentukan pihak yang dapat menerima hasil analisis transaksi mencurigakan yang dilakukan anggota TNI. “Kami akan bertemu Panglima TNI untuk membahas hal ini,” jelasnya.

Terkait pemantauan hasil analisis, ia menyebut PPATK baru saja diperkuat instrumen PP no.50 tahun 2011 yang menegaskan pihaknya memiliki kewenangan meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum yang menerima hasil analisis. Sejauh ini komunikasi sudah dilakukan dengan Polri dan KPK sehingga kedepan diharapkan setiap temuan dapat diketahui kenapa dihentikan atau tidak dilanjutkan penyidik. (iky)foto:parle

Komisi V Desak BUMN Transportasi Selesaikan Audit Dan Pemisahan Aset

Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN untuk menyelesaikan audit dan pemisahan aset (kualitatif dan kuantitatif) sesuai amanat undang-undang sesegera mungkin.

Komisi V DPR juga meminta laporan audit dan pemisahan aset disampaikan kepada Komisi V DPR RI setiap 3 (tiga) bulan.

Demikian salah satu point penting kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Direksi PT Angkasa Pura I-II, Direksi PT Pelindo I-IV, dan Dirut PT KAI beserta jajaran terkait lainnya, Selasa (21/2) di gedung DPR.

Rapat Komisi V DPR dengan mitra BUMN Transportasi kali ini mengagendakan inventarisasi pemisahan aset pemerintah (regulator) dan BUMN bidang Transportasi (operator) berdasarkan undang-undang dan optimalisasi aset BUMN bidang transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan transportasi serta meningkatkan kualitas pelayanan pengguna.

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi V DPR juga mendorong Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pemisahan badan penyelenggara prasarana dan badan penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian sesegera mungkin dan meminta laporannya setiap 3 (tiga) bulan.

Dukungan ini diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana PT Kereta Api, sehingga ke depan PT KAI diharapkan menjadi BUMN transportasi yang professional.

Terhadap pemisahan aset perkeretaapian, Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan menyampaikan, dalam rangka penatausahaan laporan barang milik negara Ditjen Perkeretaapian dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun



Susana Rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan jajaran Kementerian Perhubungan dan lainnya

1990, maka perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian aset perkeretaapian yang menjadi milik pemerintah.

Adapun jenis aset pemerintah yang akan dilakukan inventarisasi dan penilaian antara lain, tanah, jalan kereta api, jembatan kereta api, gedung dan bangunan kereta api, sinyal kereta api dan alat telekomunikasi.

PT KAI, kata Tundjung, telah melaksanakan inventarisasi ini secara sinergis bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui tahapan-tahapan yaitu tahap persiapan (Agustus-Oktober 2010), tahap pelaksanaan (November-Desember 2010) dan tahap pemasukan data hasil inventarisasi dan penilaian ke dalam aplikasi Simak BMN.

Penyampaian hasil akhir inventarisasi dan penilaian prasarana perkeretaapian adalah sebesar Rp 56 triliun dengan rincian, tanah Rp 34,9 triliun, jalan kereta api Rp 18,53 triliun, jembatan KA Rp 1,98 triliun, bangunan dan gedung Rp 52 miliar, sinyal Rp 338 miliar dan alat telekomunikasi Rp 195 miliar.

Dengan adanya hasil inventarisasi dan penilaian yang telah dilaksanakan,

neraca aset Ditjen Perkeretaapian Tahun Anggaran 2011 menjadi Rp 83 triliun.

Tundjung menambahkan, sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi dan penilaian ini dan sesuai amanat UU Perkeretaapian, Pemerintah memperbaiki Kondisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan mengambil langkah-langkah, melakukan audit secara menyeluruh terhadap PT KAI, melakukan inventarisasi aset prasarana dan sarana PT KAI.

Selain itu, menegaskan status kewajiban pelayanan public (Public Service Obligation) dan kewajiban masa lalu penyelenggaraan program pensiun pegawai PT KAI eks Pegawai Negeri Sipil PJK/Departemen Perhubungan (Past Service Liability) serta membuat neraca awal PT KAI.

Tundjung berharap, dalam pembuatan neraca awal PT Kereta Api Indonesia pihak Kementerian Negara BUMN dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga amanah UU Nomor 23 Tahun 2007 dapat terlaksana dengan baik. (tt)foto:parle

KPK Beri Masukan Revisi UU Ibadah Haji

Terkait revisi UU No.13 Th.2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Komisi VIII mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Busyro Muqoddas untuk menerima masukan mengenai revisi Undang-undang tersebut.

Rapat Dengar Pendapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi VIII, Selasa (21/2).

Busro mengatakan, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, memang masih banyak diperlukan pembenahan-pembenahan, karena permasalahan haji selalu saja muncul di setiap tahunnya dan masalahnya tetap pada pokok permasalahan yang sama.

“Permasalahan penyelenggaraan Ibadah Haji selalu saja tidak terlepas dari masalah pemondokan, transportasi dan makanan atau catering,” jelasnya.

Selain itu menurut Busro, biaya keberangkatan calon jamaah haji pun tidak sesuai penganggarnya karena dialokasikan untuk kepentingan operasional para petugas haji. “Setiap jamaah haji Indonesia mensubsidi untuk kepentingan petugas haji yang

seharusnya dibebankan kepada APBN maupun APBD, sesuai dengan undang-undang,” katanya.

KPK juga menyoroti dana setoran awal ibadah haji yang semakin bertambah, sehingga KPK mengusulkan, untuk diadakannya moratorium pendaftaran calon jamaah ibadah haji. Saat ini ada sekitar 700 ribu orang yang sudah mendaftar keberangkatan haji dengan dana setoran awal Rp. 16 triliun sampai Februari 2012. Jumlah pendaftar sudah mencapai 1,4 juta orang dengan jumlah setoran awal mencapai Rp. 33 triliun.

“Karena pendaftaran haji terus dibuka, jumlah setoran awal akan terus bertambah, padahal, kuota untuk ibadah haji relatif tetap, ini sudah tidak sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 yang menghen-

daki setoran BPIH dihentikan setelah kuota tahun berjalan terpenuhi,” tegas Busyro.

Mahrus Munir, Anggota Fraksi Partai Demokrat menilai, masukan-masukan yang diberikan oleh KPK telah banyak menjawab rasa keingintahuannya mengenai permasalahan penyelenggaraan Ibadah Haji dan menurutnya KPK selaku lembaga mengurus persoalan korupsi memang sangat dibutuhkan untuk perbaikan-perbaikan kualitas terutama transparansi anggaran.

“Tujuannya revisi UU ini tentunya agar Undang-undang dapat lebih mengatur mekanisme penyelenggaraan haji yg sesuai, ideal, dan transparansi,” jelasnya.(ra)/foto:iwan armanias/parle



Suasana Rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR dengan KPK di Gedung DPR Senayan, Jakarta

Komisi X DPR RI Minta Kepala Perpustakaan Tingkatkan Program Minat Baca

Komisi X DPR RI meminta Kepala Perpustakaan Nasional RI agar program/kegiatan yang terkait dengan minat dan kebiasaan membaca lebih dioptimalkan dan ditumbuh kembangkan yang selanjutnya menjadi budaya baca bagi masyarakat Indonesia.

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur saat menutup Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih dan jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/2)

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi X Irsal Yunus (F-PDIP) menyatakan persoalan minat baca sangat penting dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Menurutnya tidak mungkin orang mampu bersaing dalam era globalisasi tanpa membaca. Irsal menyayangkan pencapaian minat baca termasuk program yang terlambat dilaksanakan.

Irsal menyatakan keheranannya betapa berat tugas yang diemban perpustakaan nasional sebagai tulang punggung harapan bangsa, namun

alokasi dana yang diminta orientasinya hanya pada angka-angka bukan pada tujuan perpustakaan nasional.

Perpustakaan Nasional memiliki beban nomor dua dalam mencerdaskan bangsa setelah Kementerian Pendidikan Nasional namun anggarannya dinilai Irsal sangat minim.

“Kami pikir perpustakaan nasional harus masuk ke tugas dan fungsinya, kami lihat perpustakaan nasional tidak bisa menggabungkan antara tugas dan fungsinya,” kata Irsal.

Selain itu, Perpustakaan Nasional sebagai pembina perpustakaan di daerah-daerah, diharapkan mampu menjadikan perpustakaan di daerah-daerah menjadi tempat minat baca.

Selain meminta program minat dan kebiasaan membaca dioptimalkan, Komisi X DPR RI dan Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam rapat

tersebut sepakat bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan dan/atau diperuntukan pada kabupaten/kota akan dikomunikasikan terlebih dulu dengan Komisi X DPR RI.

Komisi X DPR RI juga meminta Kepala Perpustakaan Nasional RI meningkatkan kinerjanya, agar daya serap pelaksanaan APBN tahun-tahun mendatang lebih optimal. Sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan terlaksana dan hasilnya tepat sasaran sesuai dengan renstra.

Penilaian tersebut disebabkan karena daya serap APBN TA. 2011 belum optimal, dari pagu sejumlah Rp431.909.310.000,00 terserap sejumlah Rp401.620.445.880,00 (92,99%) atau tidak terserap sejumlah Rp30.288.864.120,00 (7,01%). (sc) foto:parle



Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur



Susana Rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan Kepala Perpustakaan Nasional dan jajarannya

DPR Minta KPU dan Bawaslu Serahkan Data Terkait Penyelenggaraan Pemilu

Terkait penyelenggaraan Pemilu yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Komisi II DPR meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyerahkan data terkait sebagai bahan masukan dalam melaksanakan legislasi DPR.

Demikian isi salah satu kesimpulan rapat Komisi II DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2).

dan Wakil Presiden yang akan dibahas oleh DPR, Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu untuk dapat memberikan masukan-masukan yang komprehensif.

Terkait usulan anggaran Pemilu, agar dialokasikan dari APBN, Komisi II DPR memintanya kepada KPU dan Ba-

hukum menjadi faktor yang memicu timbulnya masalah di Pemilu.

“Termasuk belum sinkronnya beberapa aturan dalam undang-undang, serta masih adanya dualism peraturan pelaksanaan. Baik peraturan dari pemerintah maupun peraturan KPU yang menimbulkan tumpang tindih aturan,” katanya

Menurutnya, pemilu merupakan pemilu yang paling banyak dasar hukumnya ketimbang pemilu legislatif atau pemilu presiden. yaitu, undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan atas uu nomor 32 tahun 2004. Sementara penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden hanya diatur dalam satu undang-undang.

“Selain itu pemilu juga diatur dalam dua peraturan yang bersifat teknis pelaksanaan. Yakni, PP dan peraturan KPU, pada pemilu legislatif dan presiden, peraturan teknis hanya diatur dalam peraturan KPU,” jelasnya.

Untuk PP pun, jelas Bambang, tak hanya ada di PP nomor 6 tahun 2005 mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakilnya. PP ini telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan PP nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005.

Ia menjelaskan, ada juga undang-undang yang bersifat khusus untuk untuk daerah yang memiliki keistimewaan. yaitu, UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh.

“Masalah regulasi itu sering menghambat pengawasan dan penanganan pelanggaran dan tak jarang memicu konflik dalam pemilu,” tutur dia. (nt) foto:parle



Ketua KPU, Hafiz Anshary

Data terkait itu antara lain mengenai jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, klarifikasi Parpol dan perseorangan sebagai pemenang Pemilu serta masalah Parpol terkait persyaratan dan pengusung calon, kelemahan regulasi yang terjadi dilapangan, dan kategorisasi penanganan putusan pengadilan khususnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Komisi II DPR juga mendorong agar peran pencegahan dari Bawaslu dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Dalam kesimpulan lainnya, terhadap RUU tentang Pemilu dan Pilpres

waslu untuk menyampaikan usulannya secara menyeluruh

Menanggapi hal tersebut, terkait evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2011, Ketua KPU Hafiz Anshary mengungkapkan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di Pemilu, antara lain, masalah regulasi yang beberapa peraturan sulit dilaksanakan, masalah pencairan anggaran dari APBD yang tak sesuai jadwal, masalah persyaratan calon, masalah putusan pengadilan yang berbeda atau melewati tahapan.

Sama hal dengan yang diungkapkan Ketua Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo, ia mengatakan ketidakjelasan peraturan dalam undang-undang, peraturan multitafsir dan kekosongan

DPR Dukung Program ISPO Berkelanjutan

DPR mendukung program Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) yang berkelanjutan. Selain itu, perlu difasilitasi alumni ISPO yang berprestasi sehingga diharapkan dapat memberikan karya nyata bagi bangsa Indonesia.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat menerima ratusan ilmuwan muda yang telah mengikuti Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) di UI Depok, Kamis malam, (23/2).

“ISPO merupakan terobosan sangat penting bagi dunia pendidikan dan riset, karena ini merupakan kesempatan untuk melakukan eskplorasi dan menjadi patokan bagian keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia,” ujar Taufik dihadapan pelajar SMP, MTS, SMA dan SMK se-Indonesia ini.

Menurutnya, DPR mengharapkan pemerintah menyusun program berkelanjutan terkait program ISPO. “Jadi targetnya tidak hanya juara olimpiade tetapi manfaat kedepannya bagi bangsa dan negara,” paparnya.

beberapa bulan lalu, jelas Taufik, di tanah air kita disibukkan oleh keberhasilan siswa SMK dalam membuat kendaraan sehingga semua pihak terhenyak mulai dari politisi, pemerintah dan mengakui ternyata banyak anak bangsa kita yang mampu membuat karya potensial bagi bangsa.

“Keterlibatan para ilmuwan muda ini tidak terlepas dari peran orang tua, guru dan sistem pendidikan kita, ini masih jalan panjang dalam menumbuhkan semangat riset dan kita harapkan pemerintah memberikan apresiasinya terhadap ISPO ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, DPR mendukung penuh terhadap program ISPO dalam rangka menumbuhkan semangat belajar dan riset bagi para pelajar. “Kita harapkan tidak hanya seremonial tetapi karya nyata program ISPO bagi negara,” terangnya.

Taufik mengatakan, program khusus itu bisa berupa pelatihan bagi ilmuwan muda sehingga kedepan tidak hanya pintar melakukan riset tetapi juga mampu membuka lapangan pe-



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri)

kerjaan bagi rakyat Indonesia. “Jadi tidak hanya pintar riset tetapi pandai membuka lapangan pekerjaan. kita tidak ingin setelah lulus bingung mau kerja dimana ini,” katanya.

ISPO, paparnya, merupakan tahapan pengenalan riset berupa rintisan dan rekayasa engineering karena itu harus sedini mungkin diperkenalkan pada tingkat pelajar.

Ratusan ilmuwan muda mengikuti Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) 2012 pada 22-23 Februari di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. ISPO melombakan enam bidang, yaitu Fisika, Kimia, Biologi, Teknologi, Lingkungan dan Komputer.

ISPO didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) dan beberapa Universitas terkemuka di Indonesia. Kegiatan tersebut diperuntukan bagi generasi muda Indonesia tingkat SMP, MTS, SMA, MA dan SMK se-Indonesia.

“Tujuan ISPO adalah menyiapkan masa depan bangsa yang lebih cerah melalui generasi muda yang kreatif, inovatif, ilmiah dan bertanggung jawab,” kata ketua panitia ISPO 2012, Bambang Soedibyo. Total 358 peserta yang akan tampil memamerkan dan memprestatasikan 179 karya ilmiah pada ISPO 2012. Mereka akan didampingi 150 guru pembimbing.(si)foto:parle

Ketua DPR RI Demokrasi Bukan Penyebab Timbulnya Budaya Korupsi

DPR RI Marzuki Alie menegaskan sistem demokrasi bukanlah penyebab timbulnya budaya korupsi. Tidak ada korelasi antara budaya demokrasi dengan lahirnya pemimpin yang korup.



Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Korupsi bisa terjadi dalam sistem politik apapun, seperti komunis, monarki, liberal, maupun teokrasi. Hal itu dikatakan Ketua DPR saat menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional dengan tema: “Membangun Mentalitas Kecerdasan dan Kejujuran dalam Mengantar Kemajuan Bangsa”, sekaligus Kongres Ke-1 Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang berlangsung di Kampus Universitas Islam Darul Ulum (Unisda), Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (18/2).

Marzuki mengatakan, korupsi sangat erat korelasinya dengan kekuasaan. Jika kekuasaan tidak didasarkan pada etika dan dasar agama yang kuat, maka korupsi akan tumbuh subur. “Power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely,” ujarnya mengutip pendapat pakar politik Inggris, Lord Acton. Dia menjelaskan, penyebab korupsi lebih pada individu maupun kelompok, kesadaran masyarakat, dan peran perundang-undangan.

Lebih lanjut Ketua DPR memaparkan, demokrasi memang bukan yang terbaik. Namun Winston Churchill, perdana menteri Inggris yang menjabat selama dua periode, tahun 1940-1945 dan 1951-1955 mengatakan, hingga saat ini

belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Demokrasi menciptakan kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan yang diatur oleh konstitusi, dan hubungannya dengan ekonomi.

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dalam kemajemukan/pluralitas, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, demokrasi tidak hanya prosedural, menghargai perbedaan pendapat dan berkompromi, demokrasi juga bukan sesuatu yang instan tapi merupakan proses yang terus berjalan.

Maraknya korupsi akibat lemahnya aparaturnegara, lemahnya penegakan hukum, dan tidak ada political will dari pemerintah pusat maupun daerah. “Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional (TI) terhadap 178 negara, menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8. Pada tahun 2011 di posisi 100 dari 182 negara dengan nilai 3,0. Indeks demokrasi menurut Bappenas 63,3%, sementara menurut Puskapol UI indeks demokrasi 4,99 (skala 0-10),” ujar mantan Sekjen Partai Demokrat ini menjelaskan.

“Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melawan korupsi, apakah kita biarkan,” Tanya Ketua DPR kepada peserta seminar. “Padahal setiap sholat kita mengakui Muhammad Rasulullah. Tapi dalam prakteknya kita tidak mencontoh perilaku Rasulullah,” tukasnya. Mengutip hadits Rasulullah SAW, Marzuki Alie menegaskan yang menyuap dan yang disuap kedua-duanya masuk neraka. Faktanya sekarang banyak suap menyuap dilakukan oleh orang muslim bahkan sarjana.

Sependapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Ketua DPR mengatakan, pendidikan anak-anak ke depan perlu ditekankan

pada penguatan akidah, sehingga Tuhan selalu hadir dalam dirinya. Nabi membangun akidah selama tigabelas tahun, baru kemudian syariahnya. “Saat ini banyak kita temui orang yang rajin berpuasa dan sholat tapi korupsi jalan terus, artinya praktek korupsi seakan-akan tidak ada hubungan dengan agama, sesuatu yang terpisah dari agama,” imbuhnya.

Pembicara selanjutnya, Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan, Pasca reformasi 1998, konstitusi kita rubah untuk menghasilkan lembaga-lembaga Negara yang bersih dan tidak korup. Faktanya sudah 14 tahun reformasi, korupsi bukan berkurang malah merajalela, bahkan lebih dari jaman orde baru. Apakah demokrasi sudah benar.

Mahfud mengungkapkan, demokrasi memang bukan sistem terbaik, tapi dia terbaik dari yang jelek. “Parpol sekarang tidak ada yang bisa dipercaya, orang bisa bilang itu kan oknum,” ucapnya. Dia menjelaskan, sistem rekrutmen politik kita yang salah. “Hasil survey akhir-akhir ini menunjukkan bahwa rakyat tidak percaya lagi dengan parpol,” tukasnya.

Manfud menambahkan, money politic merupakan praktek korupsi yang terjadi di berbagai bidang, bahkan dalam olahraga pun korupsi terjadi. “Korupsi sudah terjadi di mana-mana,” tegasnya. “Pak Laode dari Buton tadi sudah mengatakan, bahwa kuncinya adalah pendidikan akhlak,” katanya. Sejak reformasi kita sudah sepakat memulai perbaikan negeri ini dengan akhlak dan agama. “Tetapi biasanya saat sudah menjabat hilang akhlaknya dan ikut korupsi juga,” tukas tokoh NU ini.

Pada sesi pertama seminar ini, tiga tokoh nasional menjadi pembicara, yakni Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Prof. Dr. Katjung Marijan bertindak selaku moderator. Sebelumnya Dr. As’ad Said Ali, MA., Wakil Ketua Umum PBNU dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaefullah Yusuf berpidato sekaligus membuka rangkaian acara Kongres Ke-1 Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang berlangsung 17-19 Februari 2012. (Rn.Tvp) foto:parle

Komisi V Tanyakan Progress Penanganan Banjir Nasional

Komisi V DPR RI menanyakan kepada Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum sejauh mana progress yang telah dilakukan dalam menangani banjir-banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Pertanyaan ini disampaikan Komisi V DPR saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Sumber Daya Air, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, Senin (20/2) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Sujono.

Nusyirwan mengatakan, Panitia Kerja (Panja) Banjir yang dibentuk asal mulanya karena terjadinya bencana banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera.

Untuk penanganan yang lebih serius dan pengawasan yang lebih intensif, maka DPR membentuk Panja untuk mengatasi dan mencegah agar banjir-banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat diatasi.

Nusyirwan melihat dari apa yang dipaparkan Dirjen SDA masih belum terlihat progress yang telah dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan banjir ini.

Menambahkan pertanyaan Nusyirwan, Anggota Komisi V DPR Sudewo menanyakan apa yang telah dilakukan Dirjen SDA dan bagaimana grand strateginya untuk mengatasi berbagai permasalahan banjir di tanah air.

Karena, kata Sudewo, jika penanganan Pemerintah hanya bersifat rutin saja, dia pesimis masalah banjir nasional dari tahun ke tahun tidak dapat tertangani dengan baik.

Sementara Anggota Komisi V lainnya Rendhy Lamadjido menilai belum ada keseriusan Pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai.

Dalam hal ini Rendhy meminta Dirjen SDA segera melakukan penelitian tentang berapa sedimentasi akibat pengrusakan di hilir sungai, baik pembangunan rumah maupun penebangan hutan-hutan.



Anggota Komisi V saat mengikuti rapat

Rendhy juga mengkhawatirkan DKI Jakarta yang tidak memiliki drainase primer yang mampu menampung seluruh aliran-aliran sungai. "Kenapa Dirjen tidak memikirkan untuk membuat segera, padahal masalah banjir di Jakarta sudah sangat serius," kata Rendhy.

Dirjen Sumber Daya Air Mochamad Amron menyampaikan, Ditjen SDA telah melakukan penanggulangan banjir di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera diantaranya dengan pembuatan tanggul, peninggian tanggul, perkuatan tanggul, perbaikan tebing sungai Simanunggang akibat bencana alam yang terjadi di Tapanuli Selatan serta melakukan normalisasi sungai Pantai Labu Hilir untuk pengendalian banjir Bandara Kuala Namu.

Untuk wilayah Sumatera Barat, dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai Padang, pembangunan prasarana pengendalian banjir Batang Naras, rehabilitasi dan normalisasi Batang Bangko Amboian dan rehabilitasi dan normalisasi

Batang Hari Kenagarian Siguntur.

Di Provinsi Jambi telah dilakukan pembangunan prasarana pengendalian banjir di dua belas sungai diantaranya sungai Batanghari, Batang asai, Batang Merangin, Batang Tabir, Batang Bungo, Batang Tebo.

Sementara untuk penanganan banjir-banjir besar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum menyampaikan untuk sungai Citarum telah dilakukan pengerukan sedimentasi dari bendung Curug sampai ke Muara Gembong serta melakukan normalisasi sungai dan perbaikan sungai Cikaung.

Adapun Citarum hilir sedang direncanakan beberapa program yakni melakukan perbaikan tanggul sepanjang 105 km dan melakukan pengerukan sungai Citarum sepanjang 115 km serta penguatan tebing tanggul 7,9 km.

Dia menambahkan, di hilir juga dilengkapi dengan melakukan perbaikan hulu sungai atau bibir pantai yang selalu mengalami abrasi. Konversi juga dilakukan dengan melakukan perbaikan

kan beberapa situ di Subang, di sekitar Krawang dan Bekasi.

Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengatakan, progres dari RPJM untuk Bengawan Solo hulu adalah dari 47 km tanggul yang harus dibangun sudah 33 km terbangun atau 70% sampai tahun 2011.

Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Madiun 72 km sudah selesai 38 km, di Pacitan dari 202 km sudah selesai 69 km. Begitu juga dengan target RPJM pembangunan bendungan sebanyak 7 bendungan. Satu bendungan

sudah selesai dan satu bendungan yaitu bendungan Bendo di Ponorogo saat ini sedang dalam proses. Tahun-tahun berikutnya akan segera dilakukan pembangunan bendungan lainnya.

Selain pembuatan tanggul/bendungan juga dilakukan pengerukan yang telah dilakukan mulai tahun 2010 dilanjutkan 2012 untuk sungai-sungai di Sragen yang total keseluruhannya sepanjang 36 km.

Untuk melindungi kota Solo dari bahaya banjir, telah dilakukan peninggian tanah hulu akibat banjir tahun 2007, Solo dan Sukoharjo sepanjang

25 km dan tinggal 3 km lagi.

Dia juga melaporkan, untuk daerah Jawa Timur dimana Surabaya tahun lalu terendam banjir akibat jebolnya sebagian tanggul dari kali Lamong, telah dilakukan perbaikan tanggul-tanggul.

Kita berharap sampai tahun 2014 tanggul semuanya selesai. Namun terjadi hambatan dengan masalah sosial yaitu masalah tanah. "Semoga masalah sosial dapat segera diselesaikan sehingga pembuatan tanggul bisa dipercepat," ujarnya. (tt) foto:ry/parle

Komisi VI DPR Minta Kementerian BUMN Komitmen Selamatkan Asset Negara

Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN RI dan para Direksi berkomitmen melakukan penyelamatan asset negara, peningkatan pendapatan BUMN, dan peningkatan kemakmuran rakyat.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Usaha Jasa Kementerian BUMN bersama Direksi BUMN Pariwisata, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/2)

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi VI DPR akan melakukan RDP dengan Deputi Bidang Usaha Jasa beserta PT. Hotel Indonesia Natour yang akan dijadwalkan setelah menerima data dan dokumen terkait dengan perjanjian kerjasama (BOT) dengan pihak lain.

Komisi VI DPR meminta kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali BTDC untuk menyampaikan data asset milik negara di Nusa Dua Bali, selanjutnya Komisi VI DPR akan melakukan RDP dengan Deputi Bidang Usaha Jasa beserta PT. BTDC yang jadwal akan ditentukan kemudian.

Komisi VI DPR juga akan melaksanakan kunjungan kerja spesifik untuk melihat langsung asset-asset negara yang dikelola oleh BUMN Pariwisata.

"Kami juga memberikan catatan bahwa penyampaian dokumen perjanjian kerjasama dan skema (BOT) PT.

Hotel Indonesia Natour, dan laopran keuangan harus diterima serta penyampaian dokumen asset milik negara di

Nusa Bali, PT. Pengembangan Pariwisata Bali BTDC harus diterima pada hari Senin 27 Februari 2012.(nt)foto:parle



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana

DPR Dan Pemerintah Siap Bahas RUU PPDT

DPR RI siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) bersama-sama dengan Pemerintah. RUU PPDT ini masuk dalam salah satu Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2012 dan merupakan usul inisiatif DPR RI.

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini, Kamis (16/2) mengundang beberapa menteri terkait diantaranya Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan yang diwakili Wakil Menteri Keuangan, Perwakilan Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan Menteri Dalam Negeri dan Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk menyepakati jadwal rapat-rapat Baleg dan pengesahan mekanisme pembahasan RUU dalam Pembicaraan Tingkat I.

Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengatakan, Badan Musyawarah DPR telah menugaskan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I dengan Presiden yang dalam hal ini diwakili ke lima Menteri tersebut di atas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Tata Tertib DPR, pembahasan sebuah RUU diberikan waktu paling lama dua kali masa sidang. Dengan demikian, RUU ini harus dapat diselesaikan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012.

Oleh karena RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal ini berasal dari DPR, yang akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) adalah Pemerintah. Ketua Baleg memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyerahkan DIM pada 27 Februari mendatang. Namun Pemerintah meminta tambahan waktu satu minggu lagi untuk dapat menyusun DIM dan berjanji akan menyerahkan pada 14 Maret mendatang.

Anggota Baleg Nudirman Munir sepakat RUU ini dapat segera dibahas dan diselesaikan sesegera mungkin. Mengingat RUU ini berkaitan erat dengan masyarakat di daerah tertinggal



Ketua Baleg Ignatius Mulyono (tengah)

yang mendambakan kesejahteraan.

Biasanya, katanya, daerah tertinggal itu adanya di daerah kepulauan atau daerah perbatasan. Kita juga tahu daerah perbatasan rata-rata kondisinya buruk dan bisa dikatakan daerah-daerah perbatasan Indonesia merupakan perbatasan yang paling tertinggal.

Mulyono menambahkan, tujuan disusunnya RUU ini diantaranya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat daerah tertinggal yang adil dan sejahtera, mempercepat terciptanya keseimbangan pembangunan daerah tertinggal dengan daerah lainnya dan melaksanakan pembangunan dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dan prasarana dasar daerah tertinggal yang berkeadilan.

Materi muatan RUU ini berisikan kriteria dan penentuan daerah tertinggal, perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pengawasan dan

evaluasi, tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah dan hal penting lainnya masalah pembiayaan.

Dalam pembiayaan ini, daerah tertinggal dengan kategori ketertinggalan tinggi mendapatkan alokasi dana APBN dan APBD Provinsi tanpa menyediakan dana pendamping dari APBD kabupaten.

Untuk daerah tertinggal dengan kategori ketertinggalan sedang, mendapatkan alokasi dana APBN dan APBD Provinsi dengan menyediakan dana pendamping sebesar 3% dari APBD Kabupaten.

Sedangkan untuk daerah tertinggal dengan kategori ketertinggalan rendah, mendapatkan alokasi dana dari APBN dan APBD Provinsi dengan menyediakan dana pendamping sebesar 5% dari APBD Kabupaten.

Beberapa materi muatan dalam RUU tersebut diharapkan dapat mewujudkan adanya percepatan pembangunan di daerah tertinggal. (tt) foto:parle

Komisi V Desak Ditjen Bina Marga Dan BPJT Penuhi Standar Pelayanan Minimum

Komisi V DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) agar dalam menyesuaikan tarif tol, diawali dengan memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.



Wakil Ketua komisi V DPR H. Mulydi (kanan)

Komisi V juga meminta Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJT melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum yang belum dipenuhi oleh operator jalan tol serta menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Komisi V DPR RI.

Demikian beberapa kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulydi saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Kepala BPJT, dan para Direksi perusahaan pengelola Jalan Tol beserta jajaran terkait, Kamis (16/2) di gedung DPR.

Rapat Komisi V kali ini fokus pada

evaluasi pengelolaan dan rencana pengembangan jalan tol di Indonesia.

Mulydi mengatakan, penyesuaian tarif tol sering tidak diikuti dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Dia melihat terjadinya kemacetan di dalam tol sudah menjadi pemandangan rutin untuk tol-tol dalam kota Jakarta. Dan hal ini tentunya sangat tidak nyaman bagi pengguna tol.

Selain itu dia juga melihat beberapa ruas tol masih banyak yang berlubang dan tidak rata jalannya yang jelas-jelas hal ini tidak memenuhi standar pelayanan minimum jalan tol.

Untuk itu, Komisi V DPR mendorong penguatan kelembagaan BPJT dengan menertibkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum operator jalan tol dan memastikan terlaksananya butir-butir dalam kontrak Per-

janjian Pengusahaan Jalan Tol dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol A. Gani Ghazali mengatakan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Evaluasi pemenuhan SPM jalan tol ini, kata Gani, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Penilaian pemenuhan SPM dilakukan secara “self assessment” oleh setiap operator jalan tol.

Gani menyampaikan, BPJT melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol untuk setiap ruas jalan tol. Pelaksanaan evaluasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 302/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Untuk tarif tol dihitung berdasarkan beberapa kriteria yakni kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi.

Sedangkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula: Tarif baru = tarif lama (1 + inflasi). Pemberlakuan tarif awal dan penyesuaian tarif tol ini ditetapkan oleh Menteri.

Sementara, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyampaikan rencana pengembangan jalan tol di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya rencana pembangunan jalan tol Samarinda – Balikpapan.

Ruas jalan tol Samarinda – Balikpapan direncanakan sepanjang 84 km. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

telah melakukan persiapan berupa studi Pra-Kelayakan (2001), Studi Kelayakan, Amdal dan desain awal (2002) serta studi inventarisasi lahan dan studi penyusunan pengoperasian (2003).

Jalan tol ini merupakan ruas tol yang potensial, untuk itu diperlukan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk tersedianya lahan sebelum ditawarkan ke swasta.

Rencana pembangunan tol lainnya, rute jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang menghubungkan kawasan Nusa Dua (Selatan) menuju ke Benoa (Utara) serta akses tol menuju ke Bandara Ngurah Rai dengan panjang jalan tol 8,12 km dan akses sepanjang 1,52 km dengan dilengkapi jalur sepeda motor dan tiga simpang susun.

Selain itu, juga merencanakan pembangunan jalan tol Manado – Bitung yang menghubungkan kota Manado, Bandar udara dan Kota Bitung, dimana pembangunan ini akan mendukung terwujudnya international Port Bitung.

Jalan tol Manado – Bitung merupakan alternatif upaya menyediakan sistem jaringan transportasi yang efisien untuk menunjang pengembangan KAPET (Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu) Manado – Bitung.

Untuk wilayah Pulau Jawa, rencana pembangunan jalan tol Cismudawu sepanjang 60 km yang menghubungkan Bandung dengan rencana Bandara Internasional Kertajati dan tol Cikapali. Tol ini diharapkan akan mempersingkat waktu tempuh Bandung – Sumedang

menjadi 15 menit sekaligusantisipasi peningkatan beban traffic jalan Cadas Pangeran.

Penandatanganan kontrak paket pembangunan jalan tol Cismudawu (Cileunyi-Sumedang Dawuan) telah dilakukan pada tanggal 2 Desember 2011 dan mengawali kerjasama pertama antara Pemerintah Indonesia dengan Kontraktor Shanghai Construction Group.

Sedang untuk tol dalam kota Jakarta direncanakan rute Semanan – Sunter sepanjang 20,23 km, Sunter – Pulo Gebang 9,44 km, Duri Pulo – Kampung Melayu 12,65 km, Ulujami – Tanah Abang 8,70 km, Kemayoran – Kampung Melayu 9,60 km dan Pasar Minggu – Casablanca 9,15 km. (tt) foto:parle

Muhammad Oheo Sinapoy Soroti Soal Siskohat

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Oheo Sinapoy dari Fraksi Partai Golkar menyoroti persoalan Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Pasalnya, Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umroh) belum memberikan gambaran luas yang dimaksud apa itu Siskohat, mau diapakan dan mau bagaimana sistem ini.

“Siskohat ini adalah sistem yang canggih, Siskohat ini tidak lain adalah sebuah komputer tempat orang memasukkan data dan dikumpulkan sudah itu selesai. Ini sebenarnya yang kami minta kepada Kementerian Agama dalam hal ini adalah Dirjen PHU,” kata Muhammad Oheo Sinapoy dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Perubahan UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Chairunnisa, di Gedung Nusantara I, Selasa (21/2).

Menurutnya, Siskohat ini harus bisa mensimplifikasi proses pendaftaran dan proses pengumpulan dana setoran itu. Oleh karenanya, saya sebagai anggota parlemen menginginkan untuk mensimplifikasi sistem pendaftaran maka dia harus switching.

Dia berharap KPK memperingatkan kepada Dirjen PHU dalam hal ini sebagai pelaksana untuk berhati-hati di



Anggota komisi VIII DPR RI, Muhammad Oheo Sinapoy

dalam pengelolaan ini. “Saya pikir kita sama maka lembaga seperti KPK, BPK, DPD ikut membantu kami di dalam melakukan pengawasan sehingga apa yang kita inginkan ini betul-betul sudah optimal dan memberikan masu-

kan-masukan yang berkaitan dengan pencegahan ini,” pinta Oheo.

Sesuai dengan fungsi dan tupoksi kita semua, maka KPK harus ikut terlibat penuh di dalam hal ini, himbuhnya. (iw)/foto:iw/parle.

Komisi III Dukung Pengembalian Aset Negara yang Berada di Hongkong

Pelaku kejahatan korupsi dan tindak pidana lain akan semakin sempit ruang gerakannya setelah Komisi III DPR RI setuju meratifikasi RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

“Hongkong disadari sebagai salah satu daerah tujuan pelarian para koruptor dan kejahatan lainnya dari Indonesia, perjanjian bantuan hukum timbal balik ini merupakan bagian dari kepentingan negara untuk mendorong dan mendukung pengembalian aset dan pengejaran para pelaku,” kata anggota Komisi III, Indra saat menyampaikan pandangan mini Fraksi PKS di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, (22/2/12).

Sementara itu anggota Komisi III dari FPDIP Nurdin menyebut kejahatan sekarang ini, telah berkembang dengan pesat sesuai kemajuan teknologi sehingga tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Oleh sebab itu disadari pemberantasan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh aparat hukum di Indonesia saja, tapi diperlukan kerja sama antar negara dalam

mencegah dan memberantas kejahatan khususnya yang bersifat transnasional.

“Dengan perkembangan teknologi hasil kejahatan tidak lagi ditempatkan pada lokus yang sama dengan daerah dimana kejahatan dilakukan. Oleh karena itu FPDIP menyetujui mengesahkan perjanjian ini menjadi Undang-undang,” tandasnya.

Seluruh fraksi menyatakan kesepakatan untuk menyetujui perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hongkong RRC beberapa waktu yang lalu. Pimpinan sidang Azis Syamsudin menjelaskan satu fraksi yaitu FP3 berhalangan hadir karena sedang mengikuti Mukernas di Kediri, Jawa Timur, namun persetujuan mendukung RUU telah disampaikan secara lisan.

Pemerintah yang diwakili Menteri

Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyambut baik keputusan tingkat I dalam rapat pleno Komisi III tersebut. Proses selanjutnya pengambilan keputusan tingkat II akan berlangsung dalam rapat paripurna yang segera dijadwalkan Badan Musyawarah DPR RI.

“Ratifikasi persetujuan ini akan membuat para pelaku kejahatan semakin sulit bergerak untuk memindahkan hartanya. Apalagi kerjasama ini juga akan berlaku bagi kejahatan yang sudah terjadi di masa lalu,” kata Menkumham.

Ia menambahkan kehadiran UU ini akan melengkapi Undang-undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU no.1 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri.

“Ekstradisi pelaku kejahatan sendiri sudah diatur dalam UU no.1/2001 jadi ini melengkapi, lebih meningkatkan apa yang sudah diatur dalam UU terkait ekstradisi tersebut. Keduanya akan kita gunakan dalam bekerja sama dengan pemerintahan Hongkong,” demikian Amir Syamsuddin. (iky)foto:parle



Anggota Komisi III DPR saat penandatanganan Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Rapat Konsultasi DPR Upaya Cegah Korupsi

Pimpinan DPR, Marzuki Alie, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan hari ini menggelar Rapat Konsultasi didampingi dengan Seluruh Ketua Fraksi, Ketua Komisi III, Komisi XI, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Anggaran serta sejumlah lembaga penegak hukum (Kapolri, Jaksa Agung dan KPK) juga Jajaran Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kamis (23/2).

“ Sesuai dengan agenda hari ini, Rapat konsultasi Pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan, Pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” jelas Marzuki Alie yang bertidak sebagai Pimpinan Rapat.

Marzuki Alie mengatakan, Pimpinan DPR merasa perlu melakukan konsultasi dengan institusi terkait untuk melakukan reformasi sistem yang berjalan di lembaga ini yang dilatarbelakangi oleh banyaknya anggota dewan yang diduga terlibat kasus korupsi.

“Kita melihat banyak sekali anggota dewan yang tersandera karena kasus-kasus yang terjadi di DPR. Lebih dari 40an yang kita hitung dari sebagian anggota DPR yang ditangkap oleh KPK. Kalau terus menerus tanpa solusi tidak akan baik,” terangnya.

Marzuki menambahkan, sistem yang keliru dapat menyandera orang-orang yang bernaung didalam sistem tersebut, lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan di lembaga negara pun menjadi salah satu penyebabnya.

“Pimpinan sekarang sebagai penggerak untuk melaksanakan reformasi sepakat bersama-sama supaya kompak kelima pimpinan ini melakukan reformasi yang terkait dengan kewenangan pimpinan,” katanya.

Siswono Yudo Husodo, dalam masukannya ia mengatakan, sebaiknya dalam pemilihan anggota Badan Anggaran dari masing-masing Fraksi tidak dipilih Bendahara ataupun Wakil Bendahara Partai, karena itu dapat terkesan “miring” bagi Badan Anggaran. “Kita



Jajaran pimpinan DPR RI saat menghadiri Rapat Konsultasi DPR upaya cegah korupsi

kan ingin memperbaiki citra DPR, jadi sebaiknya hal-hal yang menjadikan bomerang dapat kita hindari,” tegasnya.

Selanjutnya Nasir Djamil perwakilan dari Komisi III mengatakan, sebagai sesama lembaga negara sebaiknya saling melindungi bukan saling melemparkan tuduhan yang menimbulkan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya dan hanya menjadi “blunder” di masyarakat.

“Jangan membangun benteng untuk melindungi diri sendiri, tetapi membangun benteng untuk bersama, semua lembaga negara dan kami ingin membenahi sistemnya. Sehingga rapat seperti ini harus diadakan secara berkesinambungan agar mendapat jawaban untuk menuju pada pembenahan tersebut,” jelasnya.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencega-

han, Busyro Muqoddas mengatakan, lembaganya siap untuk membantu DPR dalam menuntaskan korupsi, menurutnya semua harus direncanakan dengan baik sejak awal perencanaan anggarannya, lalu proses berjalannya hingga akhir.

“Menurut kami DPR ini sudah baik, karena telah mempunyai Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yang didalamnya terdapat Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi namun itu masih perlu dioptimalkan, agar dapat semaksimal mungkin bekerja, dan KPK siap membantu bersama Bagian Litbang untuk melakukan Riset, seperti yang telah dilakukan di ESDM dan yang baru saja dilakukan membantu Komisi VIII dalam permasalahan BPIH,” pungkasnya. (ra) foto:ry/parle



Pimpinan DPR menggelar Rapat Konsultasi didampingi perwakilan Fraksi, Komisi III, Komisi XI, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Anggaran, dengan lembaga penegak hukum (Polri, Jaksa Agung dan KPK) serta Kementerian Keuangan, di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kamis 23 Februari 2012. foto:RY



DPR-RI menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan lembaga negara. Hadir pada pertemuan tersebut, di antaranya Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR. 20 Februari 2012. Foto: IW, WY



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, menerima ratusan ilmuwan muda yang telah mengikuti Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) di Pustakaloka, DPR. 23 Februari 2012. foto:RY

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**